

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perekonomian yang dinamis menuntut pengelolaan perusahaan yang baik. Perusahaan harus selalu berupaya untuk mempertahankan serta meningkatkan kinerjanya di setiap sektor sebagai antisipasi persaingan bisnis yang semakin berat (Radifan, 2015). Perkembangan *sustainability report* di Indonesia telah mengalami perkembangan. Adanya aturan tegas yang mewajibkan perusahaan untuk melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan, mendorong manajer perusahaan untuk melakukan pengungkapan *sustainability report*. Namun adanya alasan tersebut, tidak membuat semua perusahaan di Indonesia melakukan pengungkapan *sustainability report*, tidak adanya *single definition* dari *sustainability reporting* yang mampu diterima secara global, maupun bagaimana seharusnya bentuk format dari *sustainability report* itu sendiri menjadi alasan utama tidak setiap perusahaan mau melakukan pengungkapan (Dilling, 2009). Alasan lainnya yaitu manajer perusahaan mempunyai tingkat inisiatif yang berbeda dalam hal pengungkapan *sustainability report*, serta penyusunannya memerlukan biaya yang banyak.

Dalam dekade terakhir ini khususnya di Indonesia, pelaporan keberlanjutan (*sustainability reporting*) mulai mendapat perhatian oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*), khususnya dari kalangan investor.

Investor tidak lagi hanya mengandalkan laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan sebagai alat untuk mengambil keputusan investasi (Aziz, 2014). Praktik dan pengungkapan *sustainability report* merupakan konsekuensi logis dari implementasi konsep dan mekanisme *good corporate governance* (GCG) yang prinsipnya antara lain menyatakan bahwa perusahaan perlu memperhatikan kepentingan *stakeholders*-nya, sesuai dengan aturan yang ada dan menjalin kerjasama yang aktif dengan *stakeholders* demi kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan. Selain itu, mekanisme dan struktur *governance* di perusahaan dapat dijadikan sebagai infrastruktur pendukung terhadap praktik dan pengungkapan *sustainability report* di Indonesia. Dengan adanya mekanisme dan struktur *governance* ini dapat mengurangi asimetri informasi. Apabila asimetri informasi dibiarkan terjadi, maka dapat menyebabkan terjadinya *adverse selection* maupun moral hazard, dengan konsekuensi perusahaan yang tidak melaksanakan praktik dan pengungkapan *sustainability report* (Aziz, 2014).

Dalam dua puluh tahun terakhir ini telah terjadi pergeseran paradigma bisnis dimana informasi non keuangan juga perlu untuk diungkapkan. Pada awalnya bisnis dibangun dengan paradigma berbasis ekonomi atau single P (*Profit*). Namun sekarang berubah menjadi paradigma pembangunan berkelanjutan. Pada paradigma single P, tujuan utama perusahaan adalah menghasilkan laba yang setinggi-tingginya tanpa memperhitungkan dampak yang timbul dari kegiatan usaha tersebut. Pandangan ini mulai berubah

seiring dengan munculnya berbagai isu mengenai kerusakan lingkungan dan masalah sosial (Aulia dan Syam, 2013).

Kesadaran untuk memperhatikan aspek lingkungan dan sosial bermula pada tahun 1983 ketika PBB membentuk Komite Bruntland, dimana salah satu rekomendasinya adalah pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) agar dilaksanakan secara konsisten. Tujuan pembangunan berkelanjutan adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup generasi sekarang tanpa mengganggu kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kehidupan mereka dengan memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Hal inilah yang mempengaruhi berubahnya pandangan paradigma bisnis dari single P menjadi *triple bottom line* (Anindita, 2014).

Sejauh mana perusahaan melaksanakan prinsip *triple bottom line* dapat dilihat dari laporan keberlanjutan (*sustainability report*). *Sustainability report* memuat tiga aspek kinerja perusahaan yakni ekonomi, lingkungan, dan sosial. Standar internasional pelaporan keberlanjutan (*sustainability reporting*) dikembangkan oleh *Global Reporting Initiative* (GRI) yang berpusat di Amsterdam, Belanda. GRI mendefinisikan *sustainability reporting* sebagai praktek pengukuran, pengungkapan, dan pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal, tentang kinerja organisasi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Anindita, 2014).

Perusahaan yang menggunakan Sumber daya alam (SDA) secara serampangan dapat menyebabkan menipisnya SDA yang ada. Kerusakan

lingkungan yang berimbang pada ketersediaan SDA sebagai bahan baku produk dapat menurunkan pendapatan perusahaan. Perusahaan harus dapat menggunakan SDA dengan efisien yang memastikan ketersediaan SDA untuk generasi selanjutnya dan mengolah limbah dengan efektif agar lingkungan sekitar tidak tercemar. Dengan tuntutan diatas, perusahaan melakukan berbagai aktivitas-aktivitas sosial dalam rangka menanggapi isu-isu sosial dan lingkungan yang beredar di masyarakat. Setelah perusahaan melakukan berbagai aktivitas tersebut, perusahaan perlu untuk melakukan pengungkapan *sustainability report*. Laporan keberlanjutan oleh perusahaan seharusnya menjadi kewajiban di Tanah Air menurut mantan Menteri Lingkungan Hidup periode 1993-1998, Sarwono Kusumaatmadja adalah hal penting. Pasalnya laporan bermanfaat untuk menghindarkan investasi dari risiko lingkungan dan risiko sosial (Aulia, 2013).

Ada beberapa faktor yang membuat perusahaan enggan membuat *sustainability report*. Pertama yaitu perusahaan tidak transparan dalam menjalankan bisnisnya, dan tidak memiliki komitmen menjadi perusahaan *good corporate governance*. Faktor kedua yaitu perusahaan menganggap *sustainability report* sebagai sebuah biaya tambahan. Sedangkan yang ketiga yaitu, belum ada suatu peraturan yang mewajibkan suatu perusahaan untuk merilis *sustainability report* (Aulia, 2013).

Komite Audit merupakan komite yang membantu dewan komisaris untuk melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan. Dalam Mulyadi (2002) menjelaskan bahwa komite audit memiliki tugas untuk

menelaah kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan, menilai pengendalian internal, menelaah sistem pelaporan kepada pihak eksternal dan kepatuhan terhadap pihak eksternal. Komite audit merupakan individu-individu yang tidak terlibat dalam aktivitas dan pengelolaan perusahaan. Komite audit merupakan individu profesional yang bertujuan melakukan pengawasan terhadap perusahaan. Tujuan dibentuknya komite audit antara lain : melakukan pengawasan terhadap proses penyusunan pelaporan keuangan dan pelaksanaan audit, pengawasan independen atas pengelolaan risiko dan kontrol, serta melaksanakan pengawasan independen terhadap proses pelaksanaan *corporate governance*.

Kepemilikan Manajerial digunakan sebagai suatu upaya untuk mengurangi konflik agensi atau konflik kepentingan antara manajer dan pemilik. Dengan kepemilikan manajerial, maka manajemen akan secara aktif ikut serta dalam pengambilan keputusan. Semakin besar kepemilikan manajerial di dalam perusahaan maka semakin produktif tindakan manajer dalam memaksimalkan nilai perusahaan, dengan kata lain biaya kontrak dan pengawasan menjadi rendah (Aziz, 2014).

Ukuran perusahaan (*firm's size*) merupakan variabel yang banyak digunakan untuk menjelaskan pengungkapan pertanggungjawaban sosial dalam laporan tahunan. Perusahaan besar lebih mudah diawasi kegiatannya di pasar modal dan di lingkungan sosial pada umumnya, sehingga memberi tekanan pada perusahaan untuk melakukan praktik pelaporan yang lebih lengkap dan cepat (Prastiwi dan Puspitaningrum, 2011). Menurut Almilia

(2008) ada beberapa argumentasi yang mendasar hubungan ukuran perusahaan dengan tingkat pengungkapan yaitu pertama perusahaan besar yang memiliki sistem informasi pelaporan yang lebih baik, cenderung memiliki sumber daya untuk menghasilkan informasi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki keterbatasan dalam sistem informasi pelaporan. Kedua, perusahaan kecil cenderung untuk menyembunyikan informasi penting dikarenakan *competitive disadvantage*.

Beberapa penelitian terdahulu terkait dengan pengaruh *good corporate governance* terhadap kualitas pengungkapan *sustainability report*, pada penelitian yang dilakukan oleh Aziz (2014), Sari dan Marsono (2013) yang dilihat dari faktor komite audit dan kepemilikan manajerial terbukti memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kualitas pengungkapan *sustainability report*. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aniktia dan Khafid (2015) membuktikan bahwa komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas pengungkapan *sustainability report*, sedangkan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengungkapan *sustainability report*.

Pengaruh ukuran perusahaan terhadap kualitas pengungkapan *sustainability report* pada penelitian yang dilakukan Ernawati (2015), Sari dan Marsono (2013) membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas pengungkapan *sustainability report*. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Anindita (2014) membuktikan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengungkapan *sustainability report*.

Pentingnya penelitian ini dilakukan karena berdasarkan penelitian terdahulu, masih terdapat hasil penelitian yang beragam mengenai kualitas pengungkapan *sustainability report*, maka peneliti termotivasi untuk meneliti kembali mengenai pengaruh komite audit, kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan terhadap kualitas pengungkapan *sustainability report*. Penelitian ini mengacu dari penelitian Aziz (2014) yang meneliti tentang pengaruh *good corporate governance* terhadap kualitas pengungkapan *sustainability report*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya menggunakan periode penelitian 2011-2012 sedangkan penelitian ini menggunakan periode 2012-2017, penelitian ini menggunakan sampel yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) alasan peneliti ini menggunakan perusahaan manufaktur karena perusahaan tersebut adanya transaksi yang lebih kompleks dan memiliki persaingan secara global, dan menambahkan variabel ukuran perusahaan dalam penelitian ini, karena pengungkapan *sustainability report* dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. Perusahaan dengan ukuran yang besar memiliki lingkungan sistem informasi keuangan yang baik, sehingga berdampak bahwa perusahaan memiliki sumber daya yang cukup untuk mengelola informasi perusahaan bagi pengguna informasi dibandingkan dengan perusahaan ukuran kecil.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dianalisis yaitu :

1. Apakah komite audit berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan *sustainability report*?
2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan *sustainability report*?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan *sustainability report*?

#### **C. Pembatasan Masalah**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali pengaruh komite audit, kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan terhadap kualitas pengungkapan *sustainability report*. Sampel penelitian adalah perusahaan manufaktur dari periode 2012-2017.

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan empiris dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk membuktikan secara empiris bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan *sustainability report*.
- b. Untuk membuktikan secara empiris bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan *sustainability report*.
- c. Untuk membuktikan secara empiris bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan *sustainability report*.

## 2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi kepada berbagai pihak, antara lain :

a. Akademisi

Memberikan informasi dan bahan referensi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan *sustainability report*.

b. Perusahaan

Sebagai informasi yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan mengenai kebijakan *sustainability report* dalam perusahaan-perusahaan di Indonesia, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan *stakeholders* perusahaan.

c. *Stakeholders*

Sebagai bahan pertimbangan dan referensi agar dalam berinvestasi para *stakeholders* memilih perusahaan yang transparan dalam mengungkapkan informasi dan memiliki kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

d. Pemerintah

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengeluarkan peraturan khusus mengenai pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan-perusahaan di Indonesia